

BAB VI

KESIMPULAN

Finlandia merupakan negara pertama di Eropa yang memberikan hak untuk memilih dan dipilih kepada warga negara perempuannya di pemilihan umum pada tahun 1907. Keberhasilan perempuan untuk memperoleh hak ini tidak lepas dari perjuangan yang dilakukan oleh gerakan perempuannya. Gerakan perempuan di Finlandia awalnya mulai muncul pada tahun 1884 dengan terbentuknya Asosiasi Perempuan Finlandia (*Finland's Association of Women/Suomen Naisyhdistys*).

Perjuangan gerakan perempuan di Finlandia bukanlah perjuangan yang mudah karena masih harus berperang melawan budaya patriarki yang masih mendominasi hampir di seluruh dunia. Selain Asosiasi Perempuan Finlandia (*Finland's Association of Women/Suomen Naisyhdistys*), tiga gerakan perempuan yang juga tidak kalah penting pada saat itu dan saling bekerja sama menyusun isu strategis adalah Organisasi Martha (*Martha Organization/Marttaliitto*), Liga Feminis Finlandia (*The League of Finnish Feminist/Unioni Naisialiitto*), dan juga *The Lotta Svard*, serta *The Group 9*.

Gerakan perempuan yang terbentuk sebelum tahun 1906 menjadikan hak pilih sebagai tuntutan mereka dikarenakan kesadaran yang muncul dari para kaum perempuan bahwa lewat hak pilih maka perempuan mempunyai hak untuk dapat terlibat dalam pembuatan keputusan negara. Keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan negara berguna untuk membawa Finlandia menjadi negara yang peduli

akan keadilan gender. Hal inilah yang terbukti dengan terpilihnya wakil-wakil gerakan perempuan di parlemen dan menjadikan Finlandia sebagai negara pertama yang memiliki jumlah anggota parlemen perempuan terbanyak pada pemilihan umum 1907 yaitu sebanyak 19 perwakilan perempuan.

Seiring dengan terlibatnya perempuan dalam parlemen, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara bertahap juga memihak kepada kaum perempuan. Selain itu, hal ini juga didukung dengan kerja sama yang dilakukan oleh gerakan perempuan di Finlandia bersama gerakan perempuan di Eropa di mana gerakan ini juga bergabung dalam *Transnational Advocacy Network* (TANs) yang mempunyai fokus sama terhadap kemajuan hak-hak dari perempuan secara umum di dunia dan secara khusus di negara masing-masing.

Pada tahun 1972, pemerintah untuk pertama kalinya mendirikan badan khusus keadilan gender yang bernama *Council of Gender Equality* diikuti dengan berdirinya *Ombudsman for Equality* dan *The Equality Board* pada tahun 1987, dan yang terbaru adalah *Gender Equality Unit* pada tahun 2001. Ketiga badan yang berada di bawah Kementerian Hubungan Sosial dan Kesehatan ini pada intinya mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk mempromosikan, mengontrol, dan mengawasi berjalannya keadilan gender di Finlandia.

Finlandia tumbuh sebagai negara yang peduli terhadap keadilan gender juga diikuti oleh gerakan perempuan yang aktif untuk mengajukan tuntutan-tuntutan yang terkait dengan ketidakadilan yang terjadi di Finlandia. Gerakan perempuan tersebut tergabung dalam satu payung di bawah *Coalition of Finnish Women's Associations* (NYTKIS) yang terbentuk pada tahun 1987 dan terus

bekerja demi meraih keadilan gender di Finlandia hingga saat ini. Seiring dengan kemerdekaan yang berhasil diraih oleh Finlandia, masalah ketidakadilan gender masih muncul dan menjadi fokus dari gerakan perempuan untuk dihilangkan, seperti tuntutan-tuntutan yang diajukan pada tahun 2000 dan 2008.

Ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan-perempuan di Finlandia terfokus pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Di bidang politik contohnya adalah kuota perempuan yang masih sedikit di parlemen, di bidang ekonomi contohnya adalah kesempatan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja, di bidang sosial contohnya adalah kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan perempuan dan prostitusi, di bidang pendidikan adalah mengenai kurikulum yang tidak memasukkan kesadaran akan keadilan gender, dan di bidang kesehatan contohnya adalah kurangnya perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak.

Untuk mengurangi ketidakadilan ini, tuntutan-tuntutan gerakan perempuan ke Pemerintah Finlandia kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan yang adil gender, seperti komitmen pemerintah dengan mengeluarkan *Act on Equality between Women and Men* pada tahun 1987 dan terus mengalami amandemen agar sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak hanya itu, secara bertahap kebijakan-kebijakan juga dikeluarkan pemerintah demi menanggapi tuntutan gerakan perempuan dan sebagai perwujudan Finlandia sebagai negara yang adil gender juga negara yang sejahtera (*welfare state*).

Dalam menanggapi masalah ketidakadilan gender di Finlandia, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di antaranya dengan menaikkan kuota

perempuan di parlemen di bidang politik, dengan mengadakan program *Equal Pay for Equal Work* dan rekonsiliasi kehidupan kerja dan keluarga di bidang ekonomi, dengan mengadopsi berbagai macam rencana aksi untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan di bidang sosial, dengan merevisi kurikulum untuk memasukkan adanya kesadaran terhadap keadilan gender di bidang pendidikan, dan dengan peluncuran berbagai program kesehatan publik di bidang kesehatan.

Pada akhirnya, keberhasilan Finlandia untuk hadir sebagai negara yang peduli terhadap keadilan gender tidak lepas dari advokasi-advokasi yang dilakukan oleh gerakan perempuan sedari sebelum negara ini merdeka maupun sesudah negara ini merdeka, dimulai dari pengorganisasian, kerja sama dengan dunia internasional, dan juga mengajukan tuntutan ke pemerintah.

Gerakan perempuan merupakan aktor penting karena dapat mempengaruhi semua lapisan, mulai dari masyarakat hingga pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Pemerintah aktif untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang adil gender dengan kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan.

Finlandia memang belum sempurna untuk menjadi negara yang secara keseluruhan berhasil memberantas segala bentuk ketidakadilan di negaranya, akan tetapi, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan secara terus menerus dan berkelanjutan menjadi bukti bahwa Finlandia secara serius berusaha untuk mewujudkan negara yang berkeadilan gender. Keadilan gender yang diterapkan di Finlandia setidaknya dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang juga tengah berjuang untuk mencapai keadilan bagi warga negaranya.